

UPAYA PEMERINTAH DESA SAGULING DALAM MEWUJUDKAN DESA SEHAT DAN SEJAHTERA (Studi pada Desa Saguling, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis)

Syara Agita¹, Adinda Ratna Febrianti², Sidiq Ali Rahman³, Tofik⁴, Sifa Rodiatul Ummah⁵,
Jikri Ramadhan⁶, Dinda Puspita Anggraeni⁷, Dida Catur Hidayat⁸, Kiki Endah⁹

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}
E-mail: agitasyara76@gmail.com

ABSTRAK

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dalam melaksanakan program pembangunan menjadikan SDGs desa sebagai acuan yang pelaksanaannya bersama lembaga-lembaga yang ada di desa, serta mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan maka dari itu tujuan penelitian ini sebagai salah satu gambaran nanti di dunia kerja khususnya prodi Ilmu Pemerintahan. Kami sebagai peserta praktek mata kuliah bisa melakukan penelitian dengan berintraksi langsung dengan prangkat pemerintah Desa Saguling dan semua aktor yang terlibat. Dalam proses perumusan kebijakan rencana kerja pemerintah desa mengenai SDGs Desa, maupun pelaksanaannya dan melakukan analisis data untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah di pahami dan di interprestasikan. Pemerintah Desa Saguling melakukan upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang handal. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan, dan dalam penelitian membahas salah satu SDGs Desa yaitu mengenai Desa Sehat dan Sejahtera.

Kata Kunci: *Pembangunan, Kesehatan, Pemerintah*

ABSTRACT

The village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on origins and customs that are recognized and respected in the system of government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The village in implementing the development program makes the village SDGs a reference whose implementation is with institutions in the village, and is able to mobilize and empower the community for the realization of sustainable development. . We, as participants in the course practice, can conduct research by interacting directly with the Saguling Village government officials and all the actors involved. In the process of formulating village government work plan policies regarding Village SDGs, as well as their implementation and conducting data analysis to simplify it into a form that is easier to understand and interpret. The Saguling Village Government is making efforts to develop reliable quality human resources. The SDGs are a global and national commitment in an effort to improve the welfare of society, covering 17 goals, and in this study it discusses one of the Village SDGs, namely regarding Healthy and Prosperous Villages.

Keywords: *Development, Healt, Government*

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pembangunan desa sebaiknya diselenggarakan secara bersamaan dengan pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat dijadikan satu tolak ukur tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan daerah. Untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan desa guna menuju masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera. agar pembangunan di tahap pemerintahan desa dapat terlaksana secara terintegrasi.

SDGs Desa menjadi acuan utama pembangunan jangka menengah desa seluruh Indonesia. SDGs teruji memudahkan dalam pengukuran pembangunan. Ukurannya sendiri menyeluruh terhadap aspek-aspek kehidupan warga dan lingkungannya.

Karena itu, pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa membuat arah pembangunan desa menjadi jelas dan terinci dalam tujuan-tujuan yang menyeluruh. Program-program SDGs yang telah dirumuskan dalam RPJMDes dan tertuang dalam RKPDes desa Saguling, dalam mewujudkan suatu pembangunan yang memerlukan partisipasi dari aparat desa, masyarakat desa dan berbagai pihak untuk merealisasikannya. Beberapa program SDGs yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes 2022 Desa Saguling.

Desa Saguling, merupakan salah satu desa di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang telah memprioritaskan penggunaan SDGs Desa dalam RPJMDes dan RKPDes, untuk mewujudkan desa membangun berbasis *Sustainable Development Goals* (SDGs) desa. SDGs Desa merupakan upaya komprehensif untuk mewujudkan pembangunan Desa, yang manfaatnya harus dirasakan oleh seluruh masyarakat desa tanpa terkecuali.

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang telah di cantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu dalam menyelenggarakan pembangunan nasional di semua bidang kehidupan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh dan terarah.

Pembangunan kesehatan pada masyarakat merupakan salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perkembangannya, sehingga dapat terjadi perubahan orientasi dalam pembangunan kesehatan.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintah Desa

Desa di bentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan daerah lain yang beda budayanya. Beberapa para ahli pakar mengemukakan pendapatnya dari tinjauan masing-masing. "Suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain".

Menurut Strong (Syafiie, 2002:12) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan ke luar.

Menurut Syafiie (2003:136) menyatakan pemerintahan adalah bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara penguasa dengan rakyatnya) dalam berbagai

peristiwa dan gejala pemerintahan yang diharapkan secara baik dan benar.

Desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Widjaja (1999:19) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran tentang desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan menurut Cotler dalam Sinambela (2006:4) Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara dalam Sinambela (2006:5) berpendapat Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urusan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Menurut Kurniawan (2005:6) mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata dan cara yang telah ditetapkan.

SDGs Desa

SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa

tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Maksud pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanahkan pembangunan desa melalui pendekatan desa membangun dan membangun desa yang terintegrasi dalam suatu perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa dilakukan dalam dua jenis, yaitu rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dalam waktu 6 tahun, dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes) dalam jangka waktu 1 tahun. RKP desa merupakan penjabaran RPJM desa yang kemudian di usulkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota melalui perencanaan pembangunan daerah.

SDGs desa juga merupakan role model pembangunan keberlanjutan dengan menitik beratkan unsur kearifan lokal dan religiusitas sebagai poin utama. Pelokalan SDGs sebagai SDGs Desa membuat arah pembangunan desa menjadi jelas dan terinci dalam tujuan-tujuan yang menyeluruh. Program-program SDGs yang telah dirumuskan dalam RPJMDes dan tertuang dalam RKPDes Desa Saguling, dalam mewujudkan suatu pembangunan yang memerlukan partisipasi dari aparat desa, masyarakat desa dan berbagai pihak untuk merealisasikannya.

Kesehatan Masyarakat

Kesehatan adalah hak setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin, yang dalam implementasinya dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang sesuai amanat pada perubahan UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (2), yaitu menyebutkan bahwa negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional, diharapkan dapat menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak sebagai hak konstitusional.

METODE

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yang dimaksud metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dalam metode deskriptif penulis dapat membandingkan fenomena-fenomena tertentu, sehingga merupakan suatu studi komperatif. (Nazir, 1988 : 63-64).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Peneliti mengambil salah satu jenis penelitian deskriptif yaitu Survey yang mana studi jenis ini merupakan studi pengumpulan data yang relatif terbatas dari kasus-kasus yang relatif besar jumlahnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang variabel dan bukan tentang individu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data demografi jumlah kepala keluarga di desa Saguling 1.507 KK dengan keluarga pra sejahtera sebanyak 256, keluarga sejahtera 1.070 KK dan keluarga sejahtera III plus sebanyak 10 KK. Jumlah penduduk desa Saguling 4.286 jiwa, dengan jumlah laki-laki 2.112, perempuan 2.174. Usia 0-17 berjumlah 1.063 jiwa, 18-55 berjumlah 2.536, 55 ke atas berjumlah 962 jiwa.

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses, transportasi,

penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi (Supriasa, 2002).

Secara sederhana gizi balita dapat didefinisikan sebagai zat yang diperlukan oleh tubuh balita untuk menunjang proses pertumbuhan dan aktivitas. Gizi diperlukan oleh tubuh balita untuk kecerdasan otak dan kemampuan fisik. Gizi sangat penting bagi pertumbuhan terutama pada usia balita. Pada masa pertumbuhan yang sangat cepat ini mengkonsumsi protein dan zat pengatur seperti vitamin dan mineral sangat diperlukan.

Selain itu, bertambahnya aktivitas memerlukan konsumsi zat tenaga, Sedangkan perkembangan mental memerlukan lebih banyak protein, terutama untuk pertumbuhan sel otaknya. Pemenuhan kebutuhan gizi yang turut menentukan kualitas tumbuh kembang, yang berarti pula kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Pada anak-anak terutama di bawah lima tahun (balita) merupakan saat rawan gizi, oleh karena itu pemenuhan kebutuhan nutrisi merupakan faktor utama untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal. Seorang balita seperti halnya setiap orang, membutuhkan berbagai macam nutrien untuk pertumbuhan dan perkembangannya, untuk mendapatkan energi dan tetap sehat. Nutrien adalah zat penyusun bahan makanan yang diperlukan tubuh yang berasal dari makanan yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitamin. Sedangkan, kebutuhan nutrien adalah jumlah zat penyusun makanan yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi secara optimal, pertumbuhan dan kesehatan.

Memberikan makanan yang sebaik-baiknya kepada balita bertujuan untuk memberikan nutrisi yang cukup untuk kebutuhan, memelihara kesehatan dan memulihkannya bila sakit, melaksanakan berbagai jenis aktivitas, pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta psikomotor.

Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga mengganggu pertumbuhan serta perkembangan kesehatan dan produktivitas anak. Beberapa penyebab stunting adalah kurangnya asupan zat gizi yang diserap oleh tubuh sejak dalam kandungan sampai dengan setelah lahir, minimnya akses pelayanan kesehatan, akses air bersih dan sanitasi. Stunting juga dapat disebabkan oleh status gizi ibu saat hamil, riwayat panjang badan lahir pendek, riwayat Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), riwayat ASI, riwayat MPASI, tinggi badan ibu, jumlah keluarga, status ekonomi, tingkat pendidikan dan pekerjaan orangtua serta tidak lepas dari pola asuh.

Adapun data yang kami peroleh dalam penelitian kali ini mengenai status gizi balita di desa Saguling yaitu untuk jumlah balita 345 orang, jumlah balita bergizi buruk 4 orang, jumlah balita bergizi baik 306, jumlah balita bergizi kurang 30 dan jumlah balita bergizi lebih sebanyak 5 orang. Sehubungan dengan data dan faktor-faktor penyebab stunting tersebut,

Pemerintah desa Saguling berupaya untuk menurunkan angka stunting melalui program rapat koordinasi rutin bersama bersama UPTD KB dan Bidan desa Saguling serta kader-kader posyandu desa Saguling yang mencakup upaya spesifik maupun sensitif. Dalam rakor penyuluhan dalam rangka upaya percepatan penurunan angka stunting di desa Saguling memanfaatkan peranan dari kader sebagai perantara langsung untuk terjun ke masyarakat.

Pemanfaatan kader posyandu dalam mengatasi permasalahan stunting sesuai dengan visi kementerian kesehatan yaitu menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dengan misi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

Posyandu yang ada di daerah-daerah merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita.

Kader posyandu merupakan penggerak utama seluruh kegiatan yang dilaksanakan di posyandu. Keberadaan kader penting dan strategis, ketika pelayanan yang diberikan mendapat simpati dari masyarakat akan menimbulkan implikasi positif terhadap kepedulian dan partisipasi masyarakat. Kader diharapkan berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif serta mampu menjadi pendorong, motivator dan penyuluh masyarakat.

Kegiatan rapat koordinasi ini ditujukan untuk percepatan penurunan angka stunting dengan meningkatkan pengetahuan warga tentang pentingnya mencegah stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan gizi seimbang di usia balita. Tidak hanya itu dalam rapat koordinasi ini UPTD KB juga mensosialisasikan mengenai aplikasi dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana nasional) yaitu ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yang mana tujuannya yaitu untuk deteksi dini kesehatan pasangan calon pengantin dan untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting.

Materinya yaitu berupa yang langsung berhubungan dengan masalah gizi seseorang, mulai dari sosialisasi untuk calon pengantin seperti pemberian suplementasi pada bayi dan balita, suplementasi Fe pada ibu hamil, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, pemenuhan gizi, persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli, IMD (Inisiasi Menyusui Dini), ASI Eksklusif padabayi sampai usia 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI mulai anak usia 6 bulan sampai dengan usia 2 tahun, berikan imunisasi dasar lengkap dan vitamin A, pantau pertumbuhan balita di

posyandu terdekat, serta terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Permasalahan stunting, penuntasannya memerlukan keterlibatan lintas sektor (diluar sektor kesehatan) yang dikenal dengan intervensi sensitif. Dampak lain dari stunting adalah gangguan perkembangan, kesehatan, dan produktivitas, sehingga jika tidak ditangani akan menimbulkan masalah yang lebih besar, dan bangsa Indonesia dapat mengalami lost generation.

KESIMPULAN

Desa Saguling, merupakan salah satu desa di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang telah memprioritaskan penggunaan SDGs desa dalam RPJMDes dan RKPDes, untuk mewujudkan desa membangun berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) desa. Pembangunan kesehatan masyarakat yang merupakan salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan menjadi salah satu dari ke 18 tujuan SDGs desa yang di prioritaskan di desa Saguling guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam perkembangannya, terjadi perubahan orientasi dalam pembangunan kesehatan.

Permasalahan mengenai stunting di Desa Saguling menjadi perhatian khusus pemerintah desa Saguling berupaya untuk menurunkan angka stunting melalui program rapat koordinasi rutin bersama bersama UPTD KB dan Bidan Desa Saguling serta kader-kader posyandu, pemanfaatan kader posyandu dalam mengatasi permasalahan stunting sesuai dengan visi kementerian kesehatan yaitu menciptakan masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dengan misi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani.

Kegiatan rapat koordinasi ini ditujukan untuk percepatan penurunan angka stunting

dengan meningkatkan pengetahuan warga tentang pentingnya mencegah stunting sejak 1000 hari pertama kehidupan dan dilanjutkan dengan gizi seimbang di usia balita.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa

Makalah Seminar, Lokakarya,:

Adistie, F., Lumbantobing, V. B. M., & Maryam, N. N. A. (2018). *Pemberdayaan kader kesehatan dalam deteksi dini stunting dan stimulasi tumbuh kembang pada balita*. Media Karya Kesehatan, 1(2).

Hidayah, N., & Marwan, M. (2020). *Upaya pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan generasi milenial sadar gizi yang bebas stunting melalui kegiatan 1000 HPK*. Journal of Community Engagement in Health, 3(1), 86-93.

Muttaqien, K., Sugiarto, S., & Sarifudin, S. (2019). *Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah*. Indonesian Journal Of Adult and Community Education, 1(1), 6-10.

Saputri, R. A. (2019). *Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 2(2), 152-168.

Internet:

Materi Penyuluhan Gizi Balita. 2015. <https://galuhachilles.blogspot.com/2015/12/materi-penyuluhan-gizi-balita.html>. (diakses 26 Desember 2022).

Riski. 2020. *Penyuluhan Pencegahan Gizi Kurang pada Balita*. https://www.academia.edu/74772110/Penyuluhan_Pencegahan_Gizi_Kurang_pada_Balita. (diakses 26 Desember 2022)